



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN

2017 - 2021





DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung Lombok Barat
Telp. (0370) 681550
E-mail : bps5201@bps.go.id



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN

2017 - 2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN
LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN**

2017-2021

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017-2021

ISBN :

No. Publikasi : 52010.2103
Katalog BPS : 9302020.5201

Ukuran Buku : 21,5 cm X 27,9 cm
Jumlah Halaman : xiii + 69

Naskah :
Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Lombok Barat

Penyunting :
Kepala badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat

Desain Cover :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat

Diterbitkan Oleh :
@Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat

Dicetak Oleh :
CV.MAHARANI

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

**Penanggungjawab Umum:
Ir. Lalu Supratna**

**Penyunting:
Drs. Sapirin**

**Penulis:
Septa Noor Pradhani, SST**

**Pengolah Data:
Septa Noor Pradhani, SST**

**Gambar Kulit:
Muhamad Fikri Anwar SST**

<https://lombokbaratka.pps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar, pendalaman sektor keuangan, penetapan pajak, kajian ekspor impor dan lain sebagainya.

Menurut teori makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yang nantinya menghasilkan angka PDRB yang sama, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* (SNA) 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pemakai data sangat kami harapkan demi penyempurnaan isi publikasi di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Gerung, April 2022

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA,


Ir. LALU SUPRATNA





DAFTAR ISI

1 2

1 PENDAHULUAN

- 3 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- 6 Perubahan Tahun Dasar PDRB

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN

31

- 34 Perkembangan PDRB Pengeluaran
- 41 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran
- 42 Konsumsi Akhir Rumah tangga
- 45 Konsumsi Akhir LNPRT
- 46 Konsumsi Akhir Pemerintah
- 49 Pembentukan Modal Tetap Bruto
- 52 Net Ekspor Barang dan Jasa

5

61 LAMPIRAN

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA 13

- Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) 15
- Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT) 18
- Pengeluaran Kons. Akhir Pemerintah (PK-P) 19
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 22
- Perubahan Inventori (PI) 25
- Ekspor – Impor 28

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT 55

- PDRB (NOMINAL) 57
- Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB 58
- APc dan APS 59

6

DAFTAR PUSTAKA 70



DAFTAR GAMBAR



		Halaman
Gambar 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	35
Gambar 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	37
Gambar 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	37
Gambar 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	39
Gambar 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	41
Gambar 6	Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar harga konstan dan konsumsi Rumah tangga Atas dasar harga berlaku Konstan 2017-2021	44
Gambar 7	Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	48
Gambar 8	Laju Pertumbuhan Implisit Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	49
Gambar 9	Laju Pertumbuhan PMTB Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	51





DAFTAR TABEL

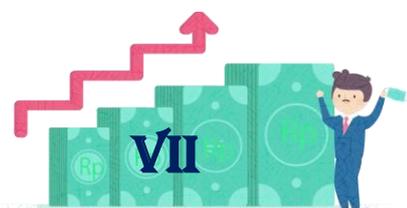
		Halaman
Tabel 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	34
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	36
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	38
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	40
Tabel 5	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	43
Tabel 6	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	45
Tabel 7	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	47
Tabel 8	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	50
Tabel 9	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	53
Tabel 10	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	58
Tabel 11	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2017-2021	59



DAFTAR LAMPIRAN



		Halaman
Lampiran 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	63
Lampiran 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	64
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2017 (persen)	65
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	66
Lampiran 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	67
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021	68



<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



BAB 1



PENDAHULUAN

--halaman ini sengaja dikosongkan--

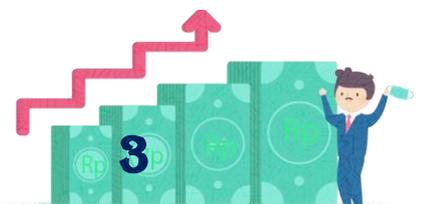
<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.



Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)



masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

-
3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut



$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas



antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;



- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"



- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.



- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.



- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



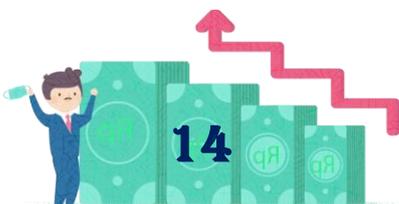
--halaman ini sengaja dikosongkan--

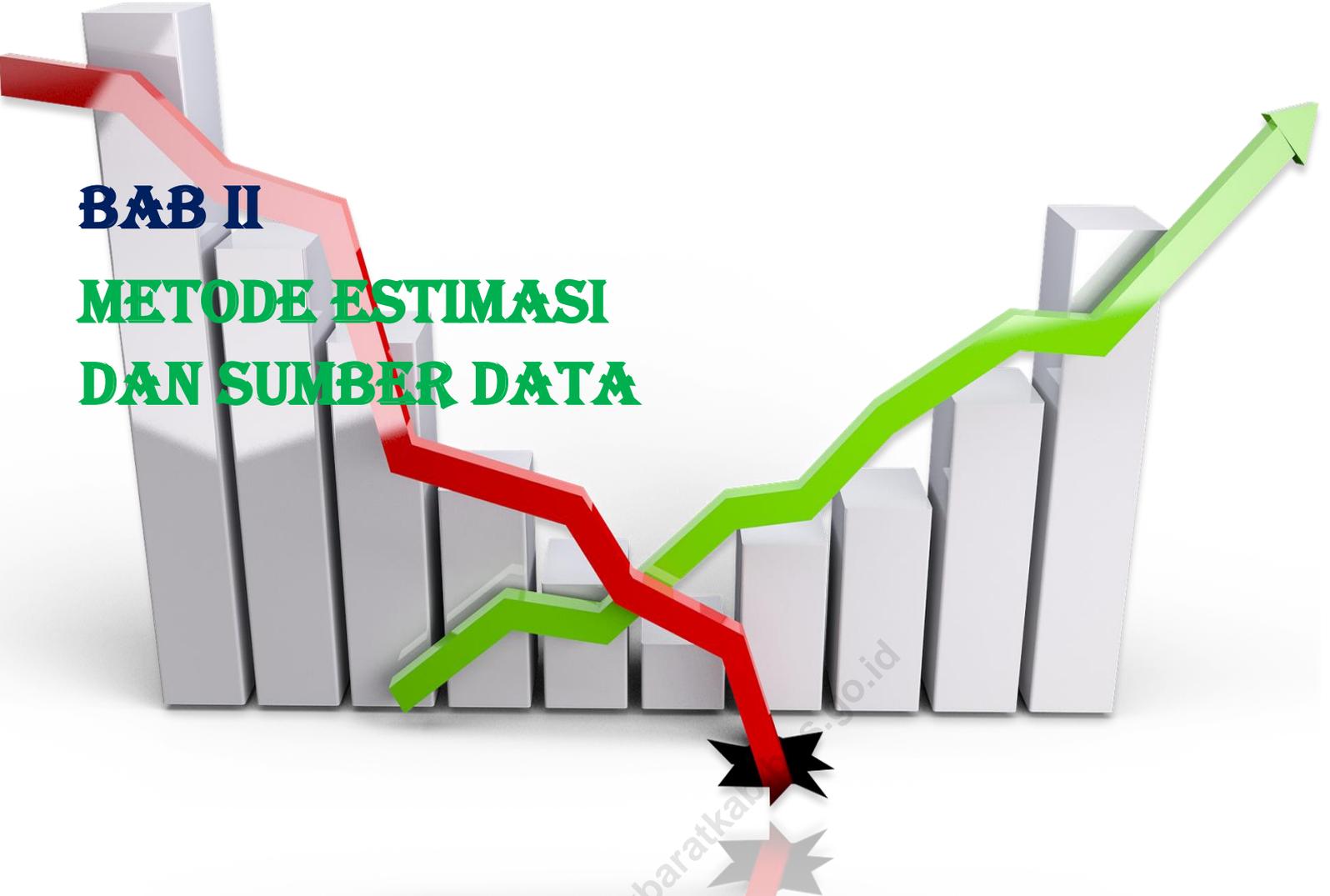
<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>





BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah



tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya



iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (ADHB) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.



2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga .

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga , serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan atau beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan



- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga



berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.



iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup:

- a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ \text{Output Bank Indonesia}$$



Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

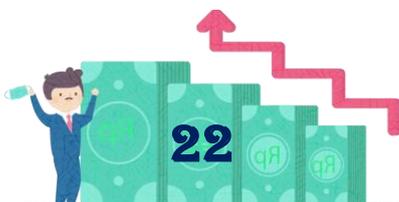
1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam



proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.



iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ **Metoda Langsung:**

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.



✓ **Metoda Tidak Langsung:**

Pendekatan Supply :

$\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi :

$\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga konstan (t-1)} \times \text{Indeks}$
 Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i **Pendahuluan**

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii **Konsep dan definisi**

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).



Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.



iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$PI \text{ atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{unit}} \times \text{Harga per unit}$$

$$PI \text{ atas dasar harga Konstan} = PI \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$PI \text{ atas dasar harga Berlaku} = PI \text{ atas dasar harga Konstan} \times IHPB \text{ rata-rata (t)}$$

$$PI \text{ atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku}}{IHPB (t)} - \frac{\text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku}}{IHPB (t-1)}$$

2.6. EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya



dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



BAB 3



TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN

--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>





BAB III

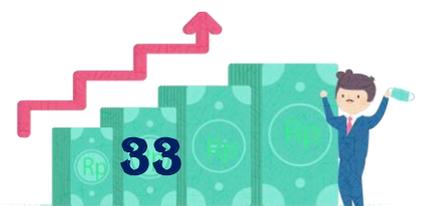
TINJAUAN PEREKONOMIAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT

PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lombok Barat Barat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 - 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional, maupun *force major* seperti gempa dan pandemi covid19 yang terjadi di Lombok Barat.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2016, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada



besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat atas dasar harga berlaku 2010 selama kurun waktu 2017 hingga 2021 relatif fluktuatif. Dalam kurun lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Lombok Barat diuji dengan dua peristiwa besar yakni gempa Lombok yang terjadi pada tahun 2018 dan pandemi covid19 yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2018 agregat PDRB Kabupaten Lombok Barat sebesar 14,47 triliun rupiah, mampu tumbuh sebesar 527 miliar rupiah disaat peristiwa gempa menggoyangkan perekonomian Kabupaten Lombok Barat. Pada Tahun 2019, menjadi tahun restrukturisasi baik infrastruktur maupun ekonomi dampak dari gempa yang terjadi tahun sebelumnya dengan mencatat agregat tumbuh mencapai 982 miliar rupiah.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

(juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.102.081,27	10.626.151,26	11.248.743,50	11.094.864,61	11.512.530,15
2. Konsumsi LNPRT	246.588,98	287.634,92	304.924,00	311.285,97	322.952,16
3. Konsumsi Pemerintah	2.154.985,81	2.182.735,24	2.255.657,85	2.326.707,35	2.381.963,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.350.442,46	5.500.762,65	6.039.787,33	5.533.025,34	6.015.778,37
5. Perubahan Inventori	60.664,86	62.194,05	59.860,49	60.106,87	30.068,79
6. Net Ekspor Barang Dan Jasa	(3.971.935,06)	(4.189.042,23)	(4.456.894,20)	(4.757.503,53)	(4.854.658,22)
PDRB	13.942.828	14.470.436	15.452.079	14.568.487	15.408.635

*Angka Sementara

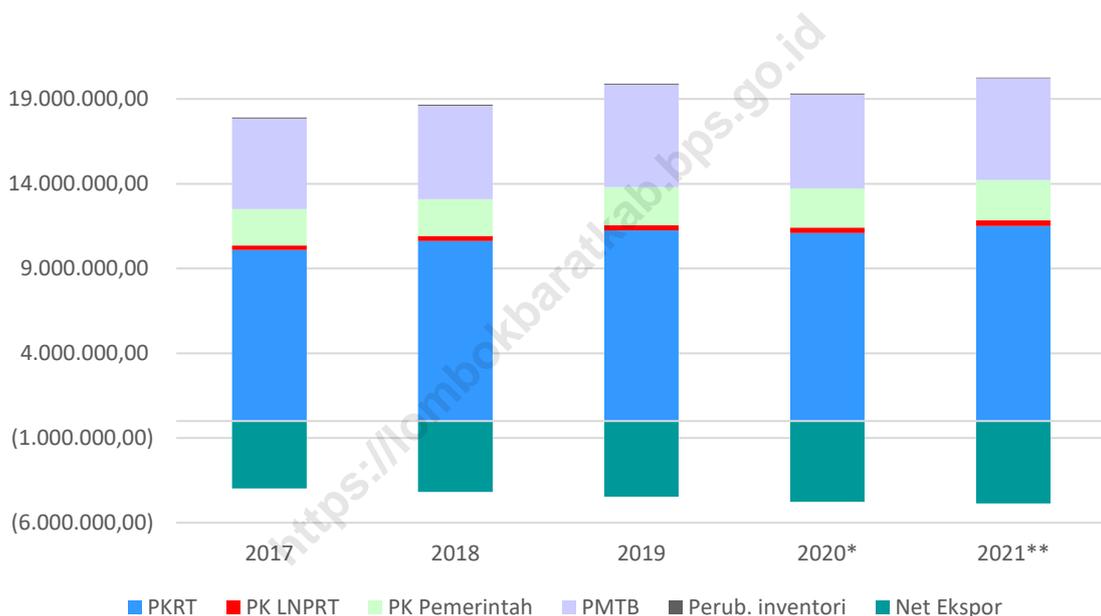
** Angka Sangat Sementara

Tahun 2020, Kabupaten Lombok Barat diuji kembali dengan cobaan pandemi Covid19 yang bahkan dampak terhadap ekonomi lebih luas dan lebih dalam daripada pada saat diterpa gempa sepanjang tahun 2018 semester kedua. Secara nominal, PDRB



Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan sebesar 883 miliar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2019. Tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan perekonomian Kabupaten Lombok Barat, dengan agregat PDRB sebesar 15.41 triliun rupiah. Meskipun perekonomian belum sebesar tahun 2019, namun kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat sebagai pelaku ekonomi mampu dan berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid19. Sentimen positif pasar akibat kebijakan pemerintah dan kehadiran Sirkuit Mandalika mampu memberikan dorongan meningkatnya perekonomian Kabupaten Lombok Barat.

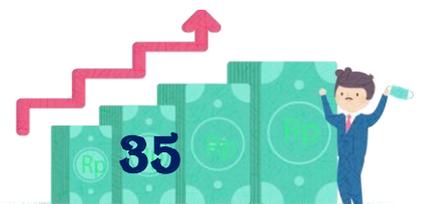
Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 (juta rupiah)



*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Lombok Barat pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:



Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

(juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.678.219,62	7.816.970,43	8.056.956,93	7.905.484,16	8.038.374,01
2. Konsumsi LNPRT	185.390,84	209.751,19	217.788,86	221.778,75	226.033,18
3. Konsumsi Pemerintah	1.330.268,42	1.329.911,93	1.362.068,26	1.385.332,77	1.394.290,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.579.249,76	3.588.864,36	3.834.036,29	3.484.345,70	3.659.583,84
5. Perubahan Inventori	37.808,82	35.180,65	32.977,21	32.347,82	15.842,12
6. Net Ekspor Barang Dan Jasa	(2.378.631,78)	(2.488.931,25)	(2.609.190,44)	(2.900.892,23)	(2.861.735,26)
PDRB	10.432.306	10.491.747	10.894.637	10.128.397	10.472.388

*Angka Sementara

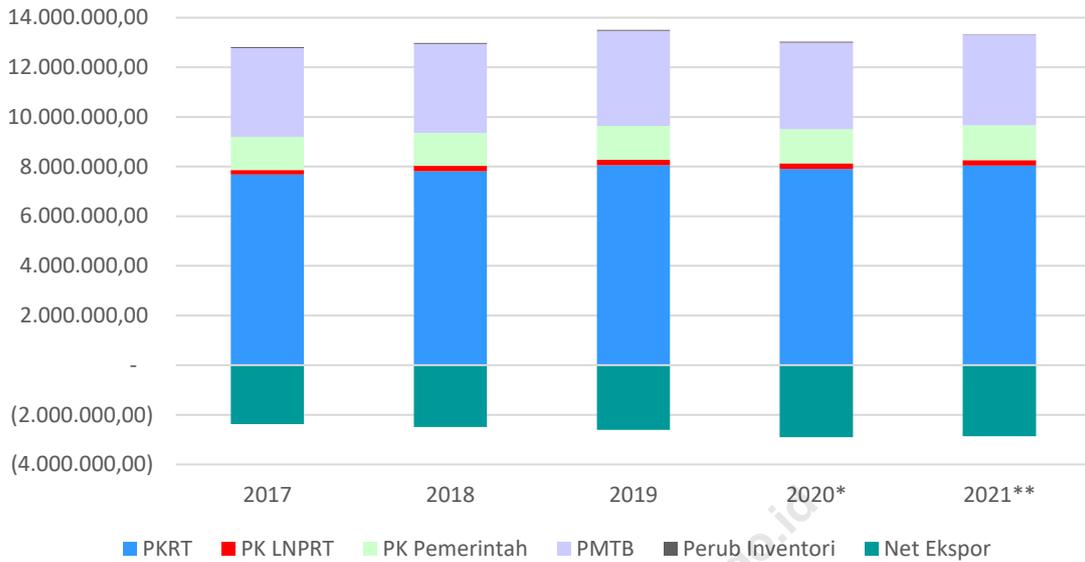
** Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2017 terus meningkat hingga tahun 2019, kemudian menurun tajam pada tahun 2020 hanya sebesar 10,13 triliun rupiah. Pada Tahun 2021 PDRB Kabupaten Lombok Barat kembali meningkat hingga 10,47 triliun rupiah.

Pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat terlihat dengan jelas pada gambar 2, dimana sejak tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Meski Musibah gempa yang mengguncang Pulau Lombok terutama di sektor pariwisata Lombok Barat pada pertengahan tahun 2018 namun perekonomian Lombok Barat masih mampu melaju positif. Pada tahun 2019 Lombok Barat mulai berbenah dengan menggenjot perekonomian dan rekonstruksi baik fasilitas umum maupun rumah penduduk pasca peristiwa gempa terjadi. Guncangan pandemi covid 19 menjadi titik balik perekonomian Kabupaten Lombok Barat yang menurun dan memukul sektor perekonomian sehingga berdampak pada *share* yang diberikan pada setiap komponen di PDRB Pengeluaran. pada tahun 2021 kembali berusaha beradaptasi dengan kondisi masa pandemi covid19.



Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021 (juta rupiah)

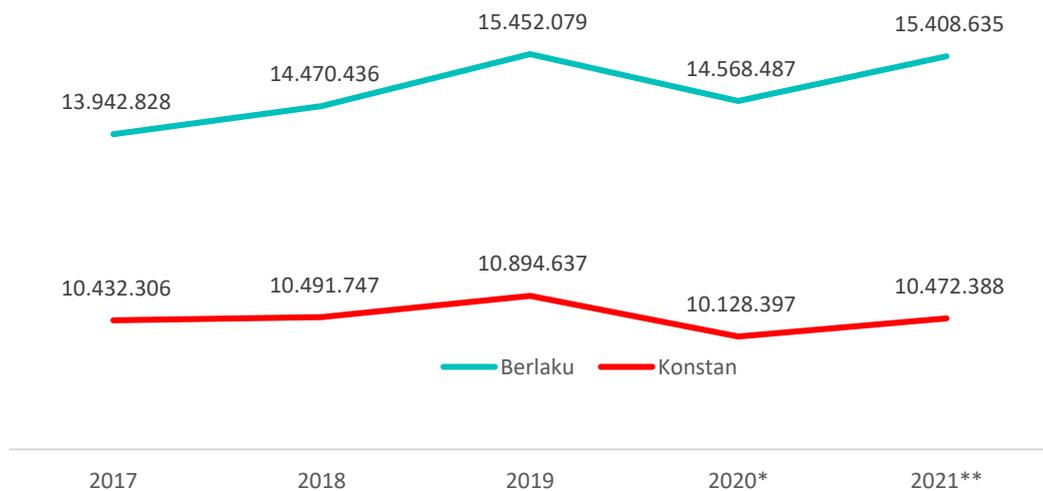


*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

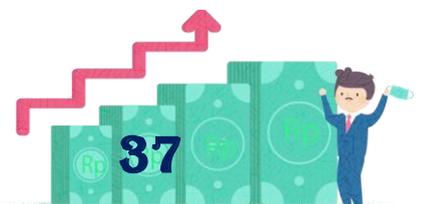
Dari grafik di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku Berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga berlaku Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan

Gambar 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021 (juta rupiah)



*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (pk-rt), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (pk-lnprt), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (pk-p), pembentukan modal tetap bruto (pmtb), ekspor neto (e) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

Komponen Pengeluaran	persentase(%)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	72,45	73,43	72,80	76,16	74,71
2. Konsumsi LNPRT	1,77	1,99	1,97	2,14	2,10
3. Konsumsi Pemerintah	15,46	15,08	14,60	15,97	15,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,37	38,01	39,09	37,98	39,04
5. Perubahan Inventori	0,44	0,43	0,39	0,41	0,20
6. Net Ekspor Barang Dan Jasa	(28,49)	(28,95)	(28,84)	(32,66)	(31,51)
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

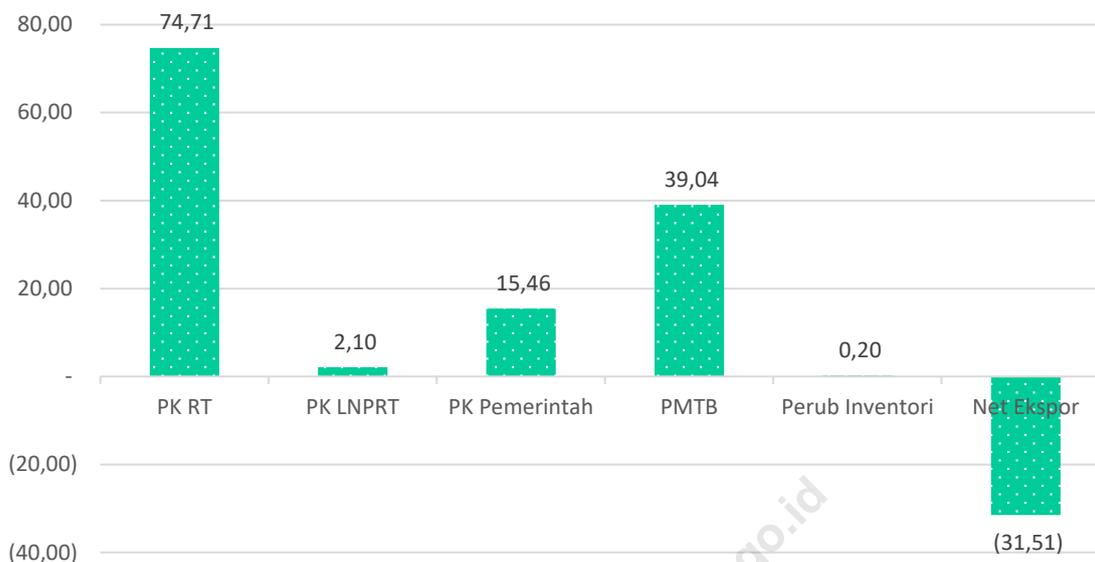
*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2017-2021, PDRB Kabupaten Lombok Barat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) di kisaran 72,45 persen hingga 76,16 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 37.98 persen sampai dengan 39,09 persen. Disisi lain, komponen net ekspor yang merupakan selisih antara ekspor dan impor berkontribusi negatif sekitar -28,49 hingga -32,66 persen. Kecenderungan perdagangan internasional dan regional dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik di wilayah Kabupaten Lombok Barat masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Lombok Barat atau bahkan dari luar negeri (impor).



Gambar 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2021 (persen)



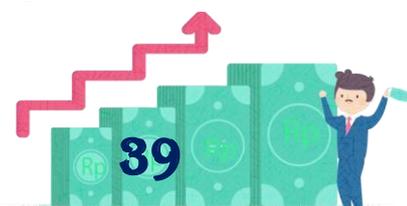
*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah selama tahun 2017 hingga 2021 berkisar antara 14,60 persen sampai dengan 15,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Demikian pula dengan Konsumsi lembaga Non profit dan komponen perubahan inventori yang merupakan komponen dengan kontribusi paling kecil dalam membangun PDRB Kabupaten Lombok Barat.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat mengalami fluktuasi dengan rincian sebagai berikut: 6,54 persen (2017); 0,57 persen (2018); dan 3,84 persen (2019); kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar -7,08 persen, dan kembali mengalami peningkatan 3,40 persen pada tahun 2021.

Perekonomian Kabupaten Lombok Barat pada kondisi yang baik mampu tumbuh diatas lima persen, seperti yang tergambar pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi selama 2018 mengalami perlambatan karena peristiwa gempa berkali-kali yang terjadi di Pulau Lombok pada akhir bulan Juli hingga bulan September. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 hanya sebesar 0,57 persen. Dampak gempa telah menghempaskan pariwisata di Pulau



Lombok. Sebenarnya pariwisata Lombok sedang naik daun pada tahun 2018 sebelum gempa terjadi. Namun sayangnya peristiwa gempa yang terjadi di utara Pulau Lombok berdampak besar dengan anjloknya bisnis pariwisata yang telah mendunia. Pada tahun 2019 Kabupaten Lombok Barat berusaha bangkit dari musibah yang terjadi dengan membangun infrastruktur umum dan bangunan yang rusak pasca gempa, serta mengembalikan situasi perekonomian yang semakin kondusif. Perekonomian mampu tumbuh sebesar 3,84 persen.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

Komponen Pengeluaran	Persentase(%)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,85	1,81	3,07	(1,88)	1,68
2. Konsumsi LNPRT	6,94	13,14	3,83	1,83	1,92
3. Konsumsi Pemerintah	6,59	(0,03)	2,42	1,71	0,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,33	0,27	6,83	(9,12)	5,03
PDRB	6,54	0,57	3,84	(7,03)	3,40

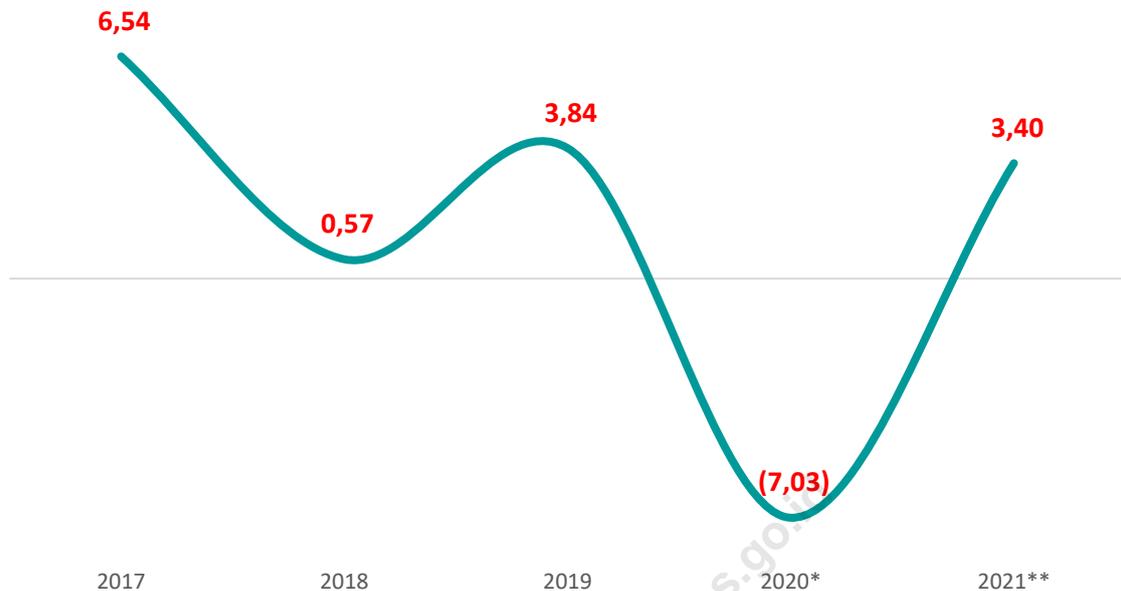
*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tahun 2020, tidak hanya sektor pariwisata, namun juga konstruksi, perdagangan dan transportasi yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Lombok Barat tertekan sangat dalam hingga minus 7.03 persen. Apabila sisi produksi menurun, maka sisi keuntungan dan upah gaji pun akan terpengaruh, dampaknya pada sisi pengeluaran ialah daya beli masyarakatpun menurun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga kontraksi hingga 1,88 persen. Pandemi covid 19 membuat progres investasi di Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2020, pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Lombok Barat mengalami kemunduran hingga 9,12 persen dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017-2021 (persen)



*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tahun 2021 sekali lagi berusaha bangkit untuk memperbaiki ekonomi dan mampu tumbuh sebesar 3.40 persen. Tahun 2021, menjadi tahun adaptasi pada kondisi baru semenjak pandemi COVID-19 melanda dan memengaruhi perekonomian secara masif. Kebijakan pemerintah adaptif dengan slogan “*new normal*” mampu menekan dampak negatif pada daya beli masyarakat dan perputaran roda perekonomian. Sentimen positif bahwa Lombok menjadi tuan rumah moto GP dan *event* kejuaraan motor balap dunia WSBK, mampu memberikan kontribusi dalam menumbuhkan perekonomian, setelah terpuruk pada tahun 2020.

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik



dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2017-2021.

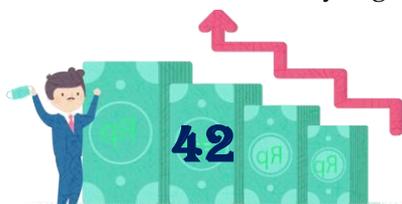
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Lombok Barat ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Lombok Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2017-2021 komponen konsumsi rumah tangga berfluktuasi. Menariknya terdapat perbedaan konsumsi rumah tangga pada saat gempa terjadi dan pada saat pandemi covid19 melanda. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 yakni saat gempa mengguncang Pulau Lombok masih mampu mengalami kenaikan dari 10,10 triliun rupiah menjadi 10,63 triliun rupiah. Pada saat gempa terjadi, masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih, seperti selimut, makanan minum, tenda, terpal dan lainnya, baik



dari bantuan maupun swadaya. Bantuan yang mengalir pasca gempa terjadi mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya baik dari sisi logistik makanan maupun non makanan, daya beli masyarakatpun tidak terlalu menurun namun hanya sempat tersendat karena akses dan fasilitas yang rusak.

Tabel 5. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

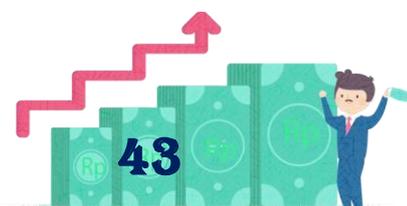
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
Atas dasar harga berlaku (<i>miliar rp</i>)	10.102,08	10.626,15	11.248,74	11.094,86	11.512,53
Atas dasar harga konstan 2010 (<i>miliar rp</i>)	7.678,22	7.816,97	8.056,96	7.905,48	8.038,37
Proporsi terhadap pdrb (% atas dasar harga berlaku)	72,45	73,43	72,80	76,16	74,71
Rata-rata konsumsi per-rumah tangga/tahun (<i>juta rp</i>)					
Atas dasar harga berlaku	53,28	55,23	57,64	54,56	56,16
Atas dasar harga konstan 2010	40,49	40,63	41,28	38,87	39,21
Rata-rata konsumsi per-Kapita/tahun (<i>juta rp</i>)					
Atas dasar harga berlaku	14,96	15,51	15,93	15,43	15,73
Atas dasar harga konstan 2010	11,37	11,41	11,41	10,99	10,98
Pertumbuhan ⁶					
Total konsumsi rt	2,85	1,81	3,07	(1,88)	1,68
Per-rt	1,31	0,33	1,61	-5,84	0,87
Perkapita	1,31	0,33	-0,02	-3,64	-0,07
Jumlah RT (<i>unit</i>)	189.610	192.401	195.159	203.361	204.986
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	675.222	685.161	706.319	719.229	731.810

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lain halnya dengan saat pandemi covid19 melanda, pembatasan berskala besar berdampak pada alur perekonomian, yang tentu saja berpengaruh pada gaji dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dampaknya adalah daya beli masyarakat menurun, pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat bawah untuk menekan dampak penurunan ekonomi, dan langkah ini cukup efektif. Pada kalangan menengah keatas pun mengurangi pengeluaran konsumsi dan lebih memilih *saving* sembari melihat kondisi selama covid 19 ini. Simpang siur isu covid19 yang beredar, distribusi barang yang tidak

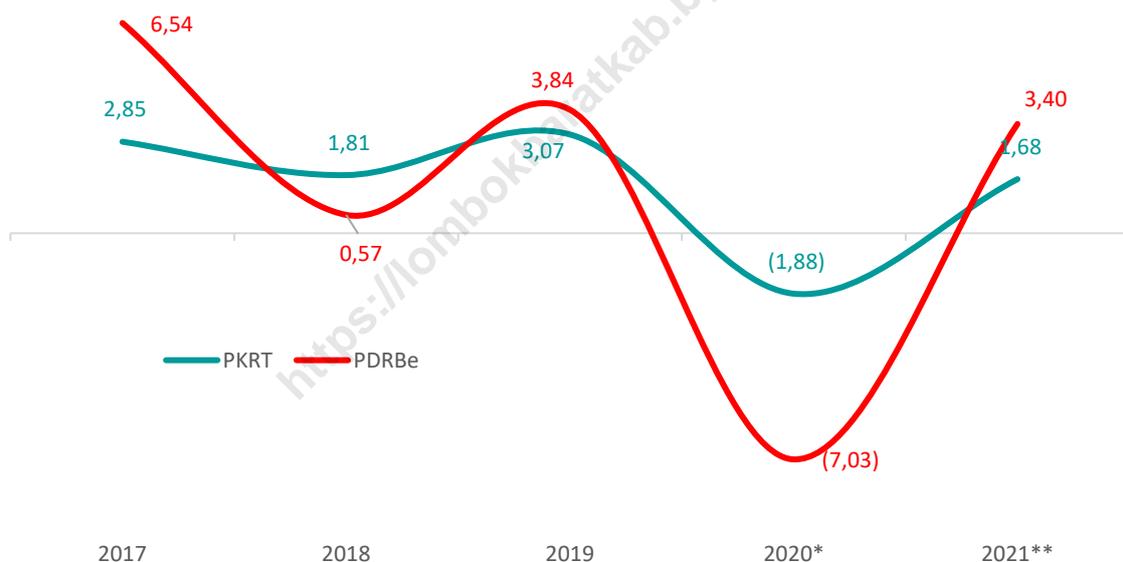
⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)



lancar akibat pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah, pendapatan masyarakat mengalami penurunan, dan kebijakan pemerintah yang masih sering berubah, menjadi beberapa alasan masyarakat untuk mengerem pengeluaran konsumsi yang dianggap tidak terlalu mendesak. Hal ini terbukti dari penurunan komponen konsumsi rumah tangga hanya sebesar 154 miliar.

PDRB Kabupaten Lombok Barat dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Naik turunnya konsumsi rumah tangga sangat berdampak pada nilai agregat PDRB Kabupaten Lombok Barat. Selama kurun waktu lima tahun terakhir proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuasi, yaitu 72,45 persen (2017); 73,43 persen, (2018), 72,80 persen (2019); 76,16 persen (2020); dan pada tahun 2021 sebesar 74,71 persen.

Gambar 6. Laju Pertumbuhan PDRB Adh konstan dan konsumsi Rumah Tangga Atas dasar harga berlaku Konstan 2017-2021 (persen)



*angka sementara

**angka sangat sementara

Selama tahun 2017-2021 laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga berfluktuasi. Kenaikan laju pertumbuhan dikisaran -1,88 hingga 3,07 persen. Secara teori, pada kondisi normal kenaikan jumlah penduduk pada suatu wilayah, maka akan meningkatkan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga pada wilayah tersebut. Anomali terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Barat, bahwasanya penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,38 persen, namun laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga perkapita mengalami penurunan hingga 1.88 persen. Pandemi covid 19 yang terjadi



pada tahun 2020 memaksa turun pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2021 daya beli masyarakat mulai membaik meskipun belum kembali normal, konsumsi rumah tangga mampu meningkat sebesar 1.68 persen.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

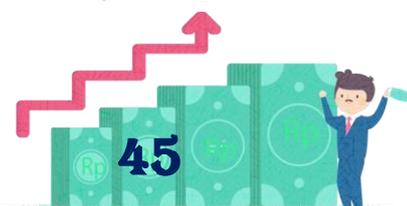
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. Atas dasar Harga Berlaku (miliar Rp)	246,59	287,63	304,92	311,29	322,95
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar Rp)	185,39	209,75	217,79	221,78	226,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,77	1,99	1,97	2,14	2,10
Pertumbuhan (% ADHK 2010)	6,94	13,14	3,83	1,83	1,92

*angka sementara

**angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT naik dari 246,59 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 322,95 miliar rupiah pada tahun 2021, naik 76,36 miliar selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT mengalami kenaikan yang signifikan karena peristiwa gempa menggerakkan lembaga-lembaga non profit untuk membantu para korban bencana alam. Banyaknya sumbangan yang disalurkan oleh lembaga non profit



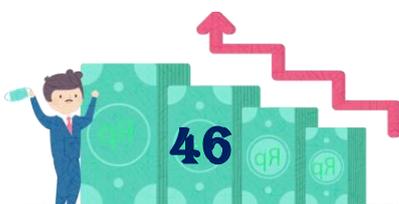
sangat berperan dan membantu untuk memulihkan perekonomian pasca gempa. Di sisi lembaga non profit, tingginya antusiasme masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk membantu korban gempa dengan menyalurkan bantuannya kepada lembaga non profit yang sebagian berada di Lombok Barat. Bantuan tersebut dibelanjakan dan diolah oleh Lembaga Non profit, kemudian disalurkan kepada korban gempa. Sedangkan tahun 2019 kenaikan laju pertumbuhan komponen LNPRT karena adanya pemilihan umum DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten, dan pemilihan presiden.

Pada Tahun 2020 dan 2021, meskipun melambat, namun pengeluaran konsumsi LNPRT semakin meningkat untuk membantu masyarakat pada saat pandemi covid 19. Meskipun bantuan didominasi oleh pemerintah, namun LNPRT memiliki andil dalam kegiatan sosial demi menanggulangi dampak covid 19.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.



Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.15 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2021 konsumsi pemerintah mencapai 2,38 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga cenderung mengalami peningkatan dalam rentang waktu lima tahun ini. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

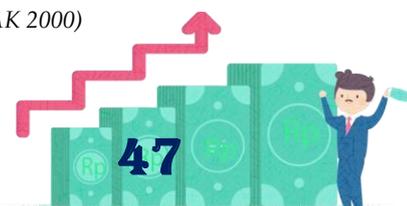
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku (<i>miliar Rp</i>)	2.154,99	2.182,74	2.255,66	2.326,71	2.381,96
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (<i>miliar Rp</i>)	1.330,27	1.329,91	1.362,07	1.385,33	1.394,29
Proporsi terhadap PDRB (<i>% Atas Dasar Harga Berlaku</i>)	15,46	15,08	14,60	15,97	15,46
Pertumbuhan ⁷ konsumsi pemerintah (<i>% Atas dasar Harga Konstan</i>)	6,59	(0,03)	2,42	1,71	0,65

*angka sementara

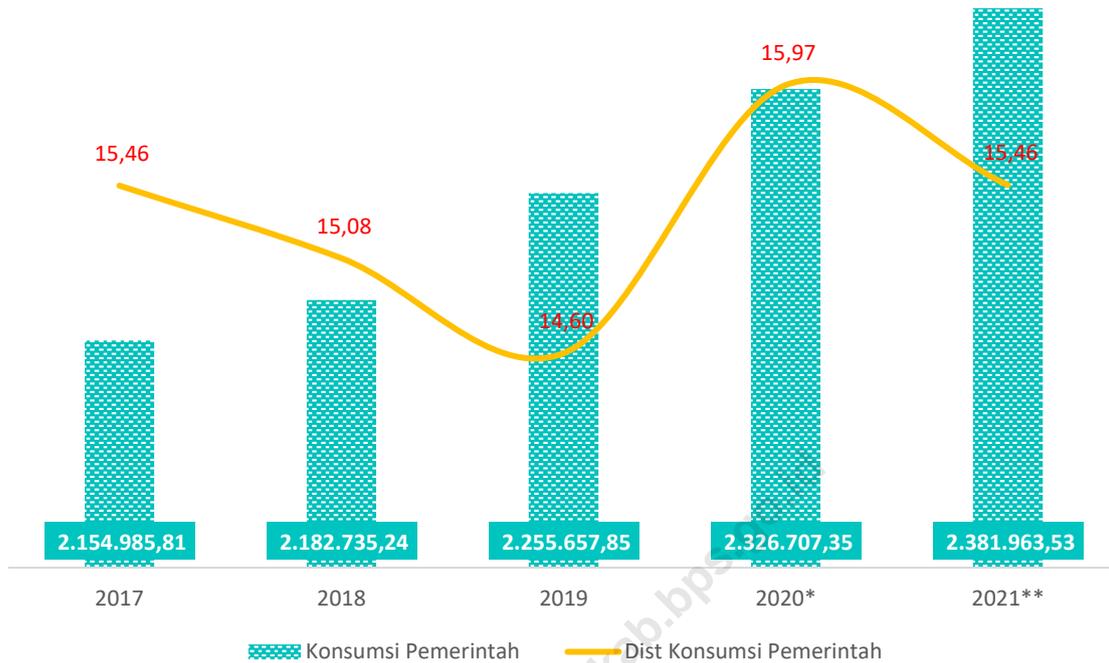
**angka sangat sementara

Menilik peranan komponen konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir berada di kisaran 14,60 persen hingga 15,97 persen. Tahun 2020, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah berperan hingga 15,97 persen. Tingginya peranan pada tahun 2020 karena pengeluaran konsumsi pemerintahlah yang mampu bertahan di tengah pandemi covid19 yang mendera, sedangkan komponen lain goyah, yang berakibat kontribusi terhadap PDRB menurun. Pada tahun 2021 komponen lainnya mulai menggeliat, sedangkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah tidak terlalu melonjak, hal inilah yang menyebabkan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sedikit mengalami penurunan terhadap PDRB.

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (*atas dasar harga konstan / ATAS DASAR HARGAK 2000*)



Gambar 7. Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2017-2021 (persen)



*angka sementara

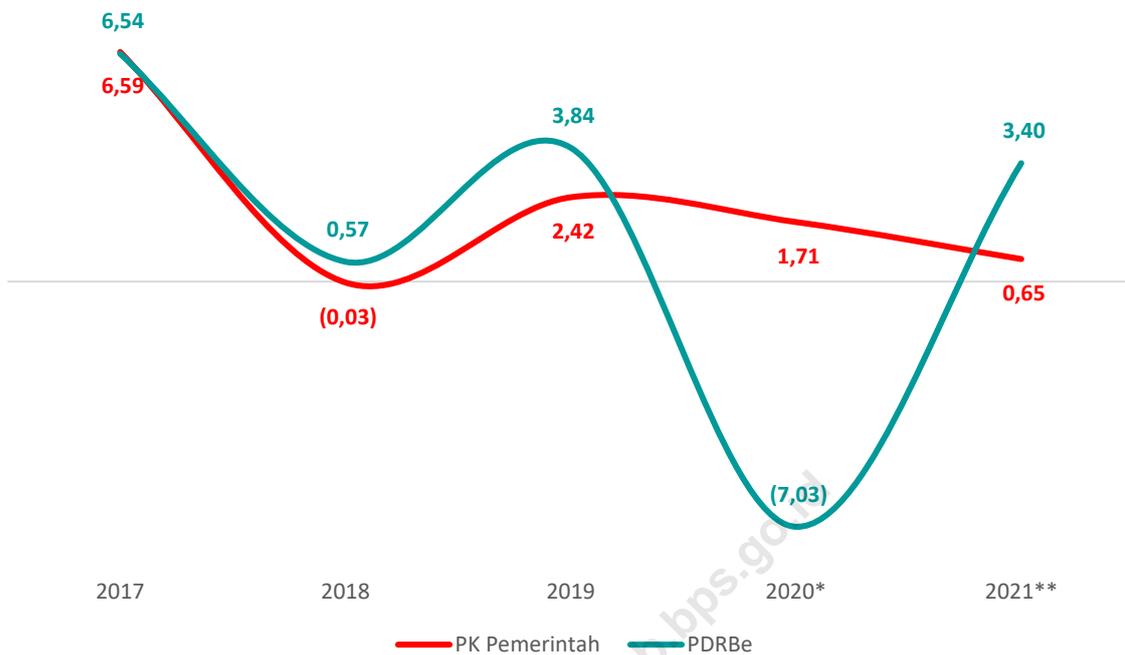
**angka sangat sementara

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak selalu searah dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat. Peranan konsumsi pemerintah tidaklah terlalu tinggi sehingga tidak dapat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Barat. Hal ini terlihat pada tahun 2018 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah kontraksi 0,03 persen, namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada tahun tersebut mampu meningkat meskipun melambat sebesar 0,57 persen. Begitupun pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat walaupun melambat sebesar 1,74 persen, namun laju PDRB Kabupaten Lombok Barat kontraksi hingga -7,08 persen.

Pada tahun 2021 pertumbuhan konsumsi pemerintah mampu tumbuh sebesar 0.65 persen. Secara agregat konsumsi pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak mampu tumbuh signifikan karena dari sisi pendapatan pun belum mampu mengalami kenaikan.



Gambar 8. Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2017-2021 (persen)



*angka sementara

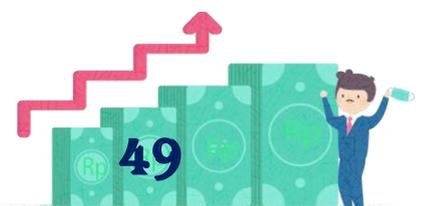
**angka sangat sementara

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB merupakan penjumlahan neto dari pengadaan, pembuatan maupun pembelian barang modal (*fixed aset*). Modalnya sendiri bisa ditanamkan oleh pihak asing maupun swasta dalam bentuk investasi. Sehingga besarnya PMTB dapat menjadi salah satu indikator geliat investasi di suatu wilayah. Untuk dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Lombok Barat, campur tangan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi masih sangat diperlukan. Suasana politik dan sosial yang kondusif serta

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor



potensi yang dimiliki oleh Lombok Barat dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 8. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>miliar Rp</i>)	5.350,44	5.500,76	6.039,79	5.533,03	6.015,78
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (<i>miliar Rp</i>)	3.579,25	3.588,86	3.834,04	3.484,35	3.659,58
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	38,37	38,01	39,09	37,98	39,04
Pertumbuhan ⁹ PMTB (% Atas dasar Harga Konstan)	5,33	0,27	6,83	(9,12)	5,03

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sebagai cerminan dari investasi yang telah berjalan di Lombok Barat, PMTB Atas dasar harga berlaku Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017 sebesar 5.35 triliun rupiah. Pada tahun 2018 meskipun terjadi peristiwa gempa PMTB meningkat menjadi 5.50 triliun rupiah. Pada tahun 2019 nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat kembali hingga 6,04 triliun rupiah. Pembangunan yang masif akibat perbaikan bangunan dan infrastruktur pasca gempa menjadi salah satu faktor meningkatnya PMTB. Pada tahun 2020 komponen PMTB mengalami penurunan 505 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 5,53 triliun rupiah. Pandemi covid19 yang melanda membuat investor mengurungkan niat sementara untuk berinvestasi, selain itu dari sisi pemerintah, anggaran belanja modal dialihkan menjadi belanja operasional yang digunakan untuk mengatasi dampak pandemi covid19. Pada tahun 2021 komponen PMTB kembali meningkat menjadi 6.02 triliun rupiah. Meskipun meningkat namun belum kembali ke semula seperti pada kondisi sebelum pandemi.

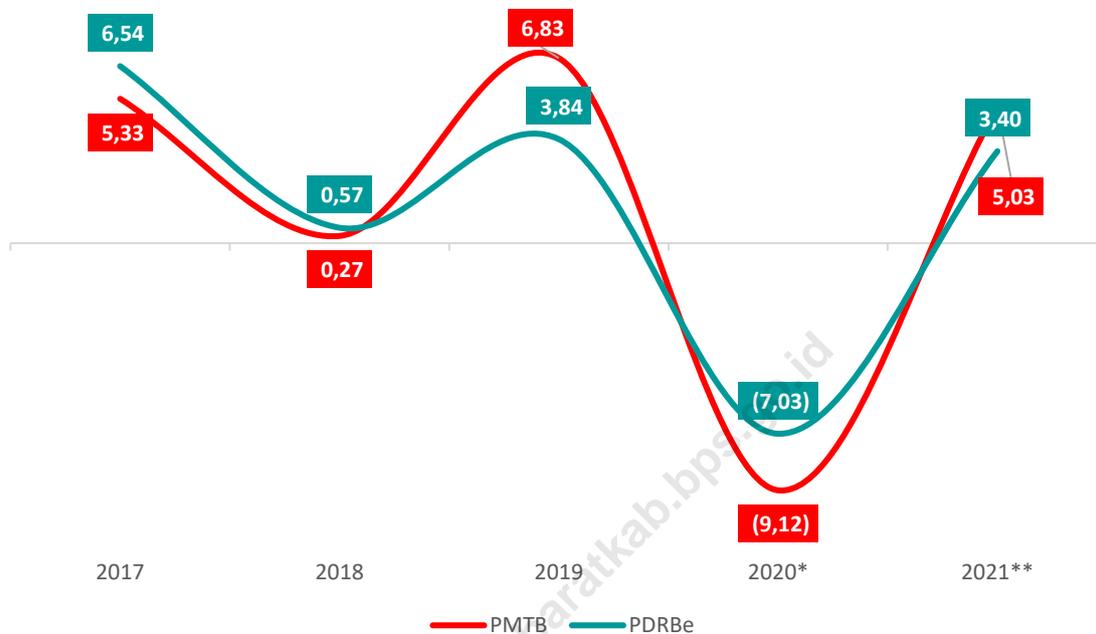
Dalam pembentukan PDRB pengeluaran Lombok Barat, kontribusi PMTB ternyata cukup besar yaitu lebih dari 38 persen. Kontribusi PMTB ini juga bahkan lebih besar dari pada kontribusi komponen Konsumsi Lembaga Non profit dan bahkan Konsumsi

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)



Pemerintah. Geliat PMTB di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dengan jelas pada pembangunan sarana dan prasarana fisik di kabupaten Lombok Barat.

Gambar 9. Laju Pertumbuhan PMTB Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2017-2021 (persen)



*angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2017 iklim investasi di Kabupaten Lombok Barat sangat bagus, hal ini terbukti dari laju pertumbuhan PMTB diatas lima persen. Tahun 2018 sebelum musibah gempa terjadi, iklim perekonomian di Kabupaten Lombok Barat sedang berada diatas angin, yang mana pariwisata lombok sedang naik daun, pada sektor transportasi rute menuju Lombok terus bertambah baik darat, laut maupun udara, serta pertanian sedang pada musim yang mendukung. Investasi yang masuk ke Kabupaten Lombok Barat pun meningkat, pembangunan perumahan subsidi menjamur, dan usaha di sektor jasa-jasa pun semakin menggeliat. Namun peristiwa gempa yang mengguncang pada Bulan Juli cukup memberikan tekanan pada perekonomian Kabupaten Lombok Barat. Laju pertumbuhan PMTB pada tahun 2018 mampu bertahan dikisaran 0,27 persen. Tahun 2019 menjadi tahun revitalisasi pasca gempa yang terjadi, pembangunan kembali rumah penduduk dan fasilitas umum dengan bantuan baik dari pemerintah, bantuan dari swasta, dan swadaya masyarakat. Laju pertumbuhan PMTB selama kurun waktu 2019 mencapai 6,83 persen.



Pandemi covid 19 kembali memukul perekonomian Kabupaten Lombok Barat yang belum pulih seperti sedia kala, bahkan berdampak jauh lebih parah daripada pada saat musibah gempa terjadi. Investor menunda investasi yang akan dilakukan, anggaran pemerintah untuk belanja modal pun dialihkan untuk penanggulangan pandemi covid 19. Perusahaan-perusahaan pun menahan untuk berekspansi, membangun fisik, maupun membeli barang modal. Kondisi inilah yang menyebabkan laju pertumbuhan PMTB tahun 2020 kontraksi hingga 9.10 persen.

Tahun 2021 masyarakat sebagai pelaku ekonomi mampu beradaptasi dengan kondisi “normal yang baru” dengan investor kembali berinvestasi di Lombok Barat baik di perumahan maupun ekspansi perusahaan. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan komponen PMTB sebesar 5.03 persen.

3.2.5. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Lombok Barat tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Lombok Barat. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang



dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Lombok Barat di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Lombok Barat terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Secara total, dalam kurun waktu 2017-2021 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai impor terus mengalami peningkatan melebihi peningkatan ekspor setiap tahunnya. Kondisi inilah yang menyebabkan nilai net ekspor terus mengalami kontraksi semakin dalam.

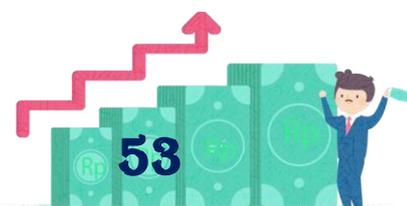
Tabel 9. Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (<i>miliar Rp</i>)	(3.971,94)	(4.189,04)	(4.456,89)	(4.757,50)	(4.854,66)
b. ADHK 2010 (<i>miliar Rp</i>)	(2.378,63)	(2.488,93)	(2.609,19)	(2.900,89)	(2.861,74)

*angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2017 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -3.97 triliun rupiah dan menurun tajam menjadi -4,85 triliun rupiah pada tahun 2021. Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung menurun dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar -2,38 triliun rupiah tahun 2017 menjadi -2,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Semenjak tahun 2020 ekspor luar negeri maupun ekspor antar daerah di wilayah Kabupaten Lombok Barat masih mengalami penurunan signifikan terutama di ekspor jasa. Adanya pembatasan wilayah antar negara maupun antar daerah pada saat pandemi covid 19 ini menjadi faktor utama menurunnya wisatawan yang berlibur ke wilayah Kabupaten Lombok Barat yang berimbas pada nilai ekspor.



Nilai impor yang masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Barat pun mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sebesar nilai ekspor. Dampak dari produksi usaha dari lapangan usaha yang berkurang, pembangunan infrastruktur yang menurun dan daya beli masyarakat yang menurun menjadi faktor menurunnya nilai impor di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



BAB 4



PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

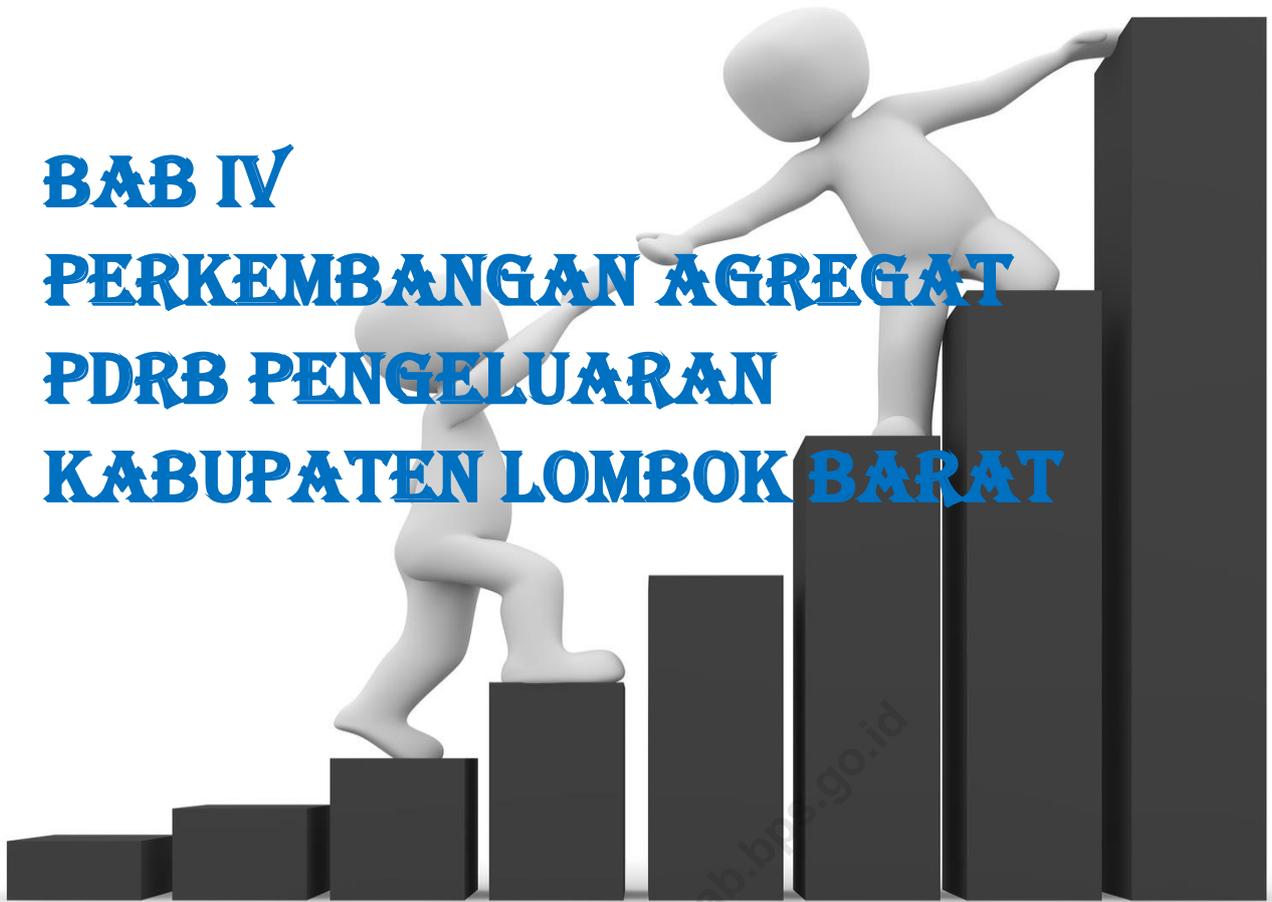
--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



BAB IV

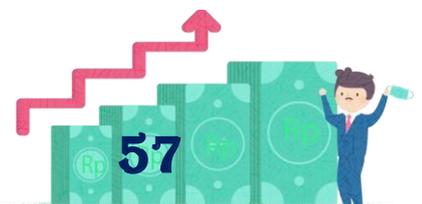
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Lombok Barat di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.



Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>miliar Rp</i>)					
- ADHB	13.942,83	14.470,44	15.452,08	14.568,49	15.408,63
- ADHK 2010	10.432,31	10.491,75	10.894,64	10.128,40	10.472,39
PDRB perkapita (<i>Rupiah</i>)					
- ADHB	20.649.251	21.119.760	21.876.913	20.255.700	21.055.513
- ADHK 2010	15.450.186	15.312.820	15.424.528	14.082.298	14.310.256
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,94	-0,89	0,73	-8,70	1,62
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	675.222	685.161	706.319	719.229	731.810

*angka sementara

**angka sangat sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Nilai PDRB per kapita Lombok Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, dari 20,65 juta rupiah menjadi 21,88 juta rupiah. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat mengalami penurunan sebesar 1,62 juta rupiah. Secara nominal PDRB perkapita tahun 2020 atas dasar harga berlaku hanya sebesar 20.26 juta rupiah. Penurunan PDRB Perkapita tahun 2020 akibat dari turunnya nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Tahun 2021, nilai PDRB perkapita sedikit mengalami peningkatan. Rata-rata setiap penduduk Kabupaten Lombok Barat berkontribusi dalam perekonomian sebesar 21.06 juta rupiah, naik 799.813 rupiah jika dibandingkan tahun sebelumnya

Jika melihat tanpa inflasi PDRB perkapita Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -8,70 persen. Penurunan PDRB perkapita menandakan perekonomian yang sedang mengalami kontraksi akibat pandemi covid 19. Dan pada tahun 2021 PDRB perkapita kembali naik sebesar 1.62 persen. meskipun tipis namun kenaikan tersebut menandakan optimisme untuk pemulihan ekonomi penduduk Kabupaten Lombok Barat.



4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 11. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar Rp)					
a. Rumah tangga	10.102,08	10.626,15	11.248,74	11.094,86	11.512,53
b. LNPRT	246,59	287,63	304,92	311,29	322,95
c. Pemerintah	2.154,99	2.182,74	2.255,66	2.326,71	2.381,96
Jumlah	12.503,66	13.096,52	13.809,33	13.732,86	14.217,45
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	13.942,83	14.470,44	15.452,08	14.568,49	15.408,63
Proporsi	89,68	90,51	89,37	94,26	92,27

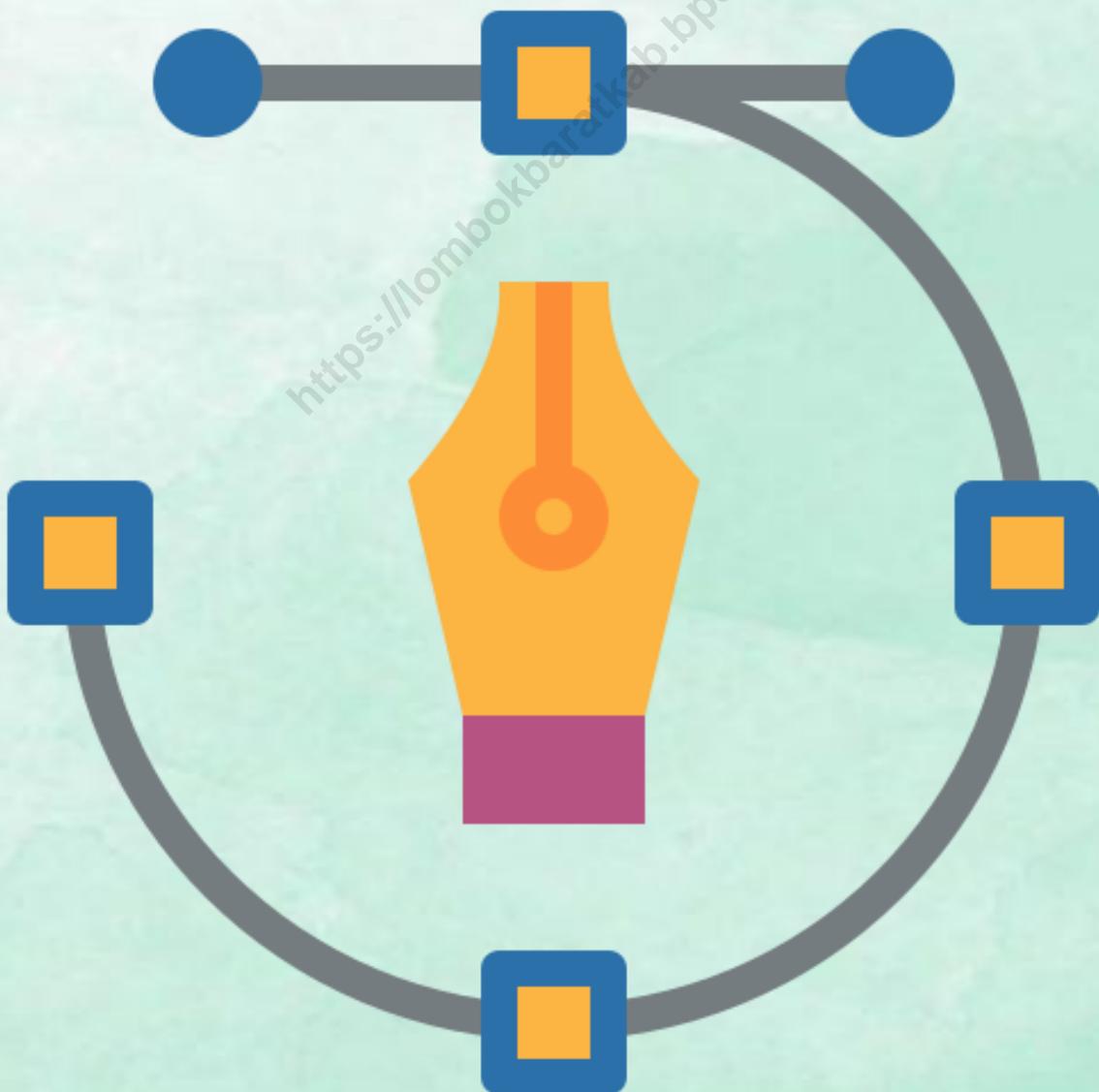
*angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2021, 92.27 persen dari nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan akhir. Dalam memenuhi permintaan akhir ini Kabupaten Lombok Barat tidak harus mengerahkan sepenuhnya dengan produk impor untuk memenuhi kebutuhannya.

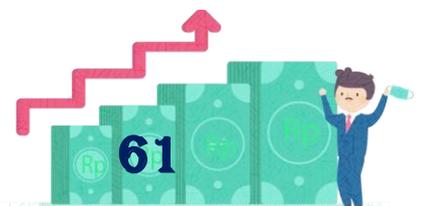


LAMPIRAN



--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



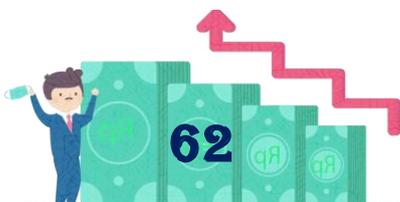
Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 (Juta rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.102.081,27	10.626.151,26	11.248.743,50	11.094.864,61	11.512.530,15
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	246.588,98	287.634,92	304.924,00	311.285,97	322.952,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.154.985,81	2.182.735,24	2.255.657,85	2.326.707,35	2.381.963,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.350.442,46	5.500.762,65	6.039.787,33	5.533.025,34	6.015.778,37
Perubahan Inventori	60.664,86	62.194,05	59.860,49	60.106,87	30.068,79
Net Ekspor	(3.971.935,06)	(4.189.042,23)	(4.456.894,20)	(4.757.503,53)	(4.854.658,22)
PDRBe	13.942.828,32	14.470.435,89	15.452.078,97	14.568.486,61	15.408.634,77

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<https://lombokbarat.go.id>

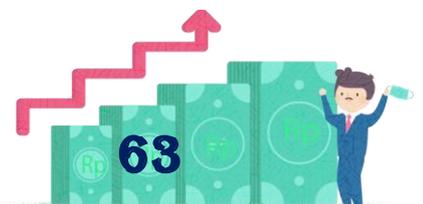


Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.678.219,62	7.816.970,43	8.056.956,93	7.905.484,16	8.038.374,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	185.390,84	209.751,19	217.788,86	221.778,75	226.033,18
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.330.268,42	1.329.911,93	1.362.068,26	1.385.332,77	1.394.290,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.579.249,76	3.588.864,36	3.834.036,29	3.484.345,70	3.659.583,84
Perubahan Inventori	37.808,82	35.180,65	32.977,21	32.347,82	15.842,12
Net Ekspor	(2.378.631,78)	(2.488.931,25)	(2.609.190,44)	(2.900.892,23)	(2.861.735,26)
PDRBe	10.432.305,67	10.491.747,31	10.894.637,10	10.128.396,98	10.472.388,27

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



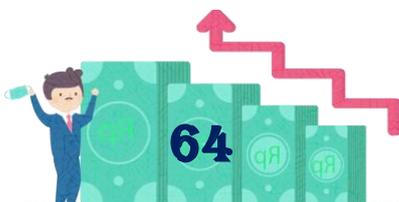
Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,45	73,43	72,80	76,16	74,71
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,77	1,99	1,97	2,14	2,10
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,46	15,08	14,60	15,97	15,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,37	38,01	39,09	37,98	39,04
Perubahan Inventori	0,44	0,43	0,39	0,41	0,20
Net Ekspor	(28,49)	(28,95)	(28,84)	(32,66)	(31,51)
PDRBe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<https://lombokbarat.kab.bps.go.id>

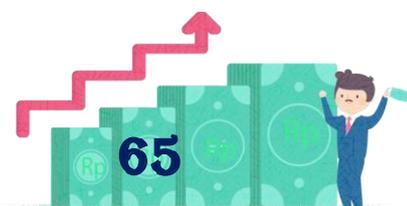


Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,85	1,81	3,07	(1,88)	1,68
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,94	13,14	3,83	1,83	1,92
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,59	(0,03)	2,42	1,71	0,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,33	0,27	6,83	(9,12)	5,03
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	6,54	0,57	3,84	(7,03)	3,40

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	131,57	135,94	139,62	140,34	143,22
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	133,01	137,13	140,01	140,36	142,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	162,00	164,13	165,61	167,95	170,84
Pembentukan Modal Tetap Bruto	149,49	153,27	157,53	158,80	164,38
Perubahan Inventori	160,45	176,78	181,52	185,81	189,80
Net Ekspor	166,98	168,31	170,82	164,00	169,64
PDRBe	133,65	137,92	141,83	143,84	147,14

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>

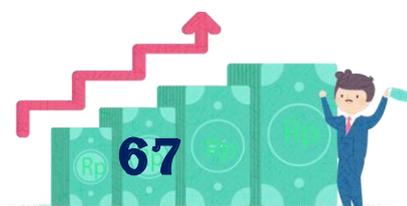


Lampiran 6 . Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,91	3,32	2,71	0,52	2,05
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,50	3,10	2,10	0,25	1,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,21	1,31	0,90	1,42	1,72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,02	2,53	2,78	0,80	3,52
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	3,60	3,20	2,83	1,41	2,29

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976

